

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil dari uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	Std. Deviation
Komite Audit (X1)	2.0000	9.0000	4.037234	1.3419185
Kepemilikan Institusional (X2)	.3000	.9988	.755462	.1657764
Dewan Komisaris (X3)	2.0000	14.0000	5.212766	2.6603540
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X4)	.0817	1.9080	.411413	.3249503
Kinerja Keuangan (Y)	-.0870	.0836	.009399	.0201384

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif yang dapat dijelaskan bahwa jumlah data penelitian (N) sebanyak 188 data yang merupakan jumlah sampel penelitian, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komite Audit (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2% yaitu berasal dari Bank of India Indonesia Tbk Tahun 2022 dan Bank *China Construction Bank* Indonesia Tbk Tahun 2022, sedangkan nilai maksimum 9% yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2024 dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 4.037234. Sedangkan standar

deviasi sebesar 1.3419185, dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data komite audit pada penelitian ini penyebarannya merata (data terdistribusi dengan baik).

- b. Kepemilikan Institusional (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.3% yaitu berasal dari Bank Amar Indonesia Tbk Tahun 2021, sedangkan nilai maksimum 0.99% yang berasal dari Bank Maspion Indonesia Tbk Tahun 2023 dan 2024. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 0.755462. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.1657764, dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data kepemilikan institusional pada penelitian ini penyebarannya merata (data terdistribusi dengan baik).
- c. Dewan Komisaris (X3) memiliki nilai minimum sebesar 2% yaitu berasal dari Bank Capital Indonesia Tbk Tahun 2023 dan 2024, Allo Bank Indonesia Tbk Tahun 2022, Bank Panin Dubai Syariah Tbk Tahun 2024, sedangkan nilai maksimum 14% yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2023 dan 2024. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 5.212766. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.6603540, dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data dewan komisaris pada penelitian ini penyebarannya merata (data terdistribusi dengan baik).
- d. *Capital Adequacy Ratio* (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0.08% yaitu berasal dari Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Tahun 2023, sedangkan nilai maksimum 1.90% yang berasal dari Krom Bank Indonesia Tbk Tahun 2024. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 0.411413. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.3249503, dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data

yang terjadi rendah, sehingga data *Capital Adequacy Ratio* pada penelitian ini penyebarannya merata (data terdistribusi dengan baik).

- e. Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai minimum sebesar -0.08% yaitu berasal dari Bank Neo Commerce Tbk Tahun 2024, sedangkan nilai maksimum 0.08% yang berasal dari Bank BTPN Syariah Tbk Tahun 2024. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 0.009399. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.0201384, dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi tinggi, sehingga data kinerja keuangan pada penelitian ini penyebarannya tidak merata (data terdistribusi dengan tidak baik).

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Pengobatan

Sig	Keterangan
0,000	Data Tidak Berdistribusi Normal

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov test diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.000 yang berarti $\leq 5\%$ sehingga hasil uji data residual tidak terdistribusi secara normal. Maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi data tidak terdistribusi secara normal dalam penelitian ini menggunakan pengobatan dengan transform dan outlier, dimana dengan mengeluarkan data sample sebanyak 12 data sampel (data nomor 65, 63, 62, 61, 40, 39, 38, 37, 28, 27, 26, 25). Berikut hasil uji normalitas setelah pengobatan:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Setelah Pengobatan

Sig	Keterangan
0,200	Data Berdistribusi Normal

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, hasil pengujian normalitas data dengan uji Kolmogrov-Smirnov setelah ditransformasi data dan dioutlier menunjukkan nilai Signifikan Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0.200 yang lebih tinggi dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan kata lain mode regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Komite Audit (X1)	.558	1.793
Kepemilikan Institusional (X2)	.942	1.061
Dewan Komisaris (X3)	.569	1.756
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X4)	.838	1.193

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

c. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi Terjadi Autokorelasi

Model	<i>Durbin-watson</i>
1	.769

Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai $dL = 1.7072$ serta $dU = 1.8000$ sehingga $4 - dU = 2.2000$. Karena berdasarkan pengambilan keputusan autokorelasi dimana $0 < dw < dL$ artinya keputusan ditolak. Maka dilaksanakan pengobatan transformasi data dengan metode Cochrane Orcutt yaitu Lag terhadap semua variabel. Berikut Hasil dari uji autokorelasi setelah

dilakukan pengobatan transformasi:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi Tidak Terjadi Autokorelasi

Model	<i>Durbin-watson</i>
1	1.989

Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa DW (*durbin-watson*) sebesar 1.989. Nilai ini akan disandingkan dengan nilai table *durbin watson* pada signifikan 5% (0,05) dengan total sampel (n) sejumlah = 176, serta variabel independen dan *Variable* moderasi (k) sejumlah (k=4), sehingga didapatkan nilai dL sejumlah 1.7072 serta dU sejumlah 1.8000. Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai dL = 1.7072 serta dU 1.8000 sehingga $4 - dU = 2.2000$. Karena nilai DW bertempat diantara Du dan $4 - Du$ ($1.8000 < 1.989 < 2.2000$). Sehingga jika diambil keputusan tidak berangsur autokorelasi baik positif ataupun negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig
Komite Audit (X1)	.385
Kepemilikan Institusional (X2)	.081
Dewan Komisaris (X3)	.000
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X4)	.001

- 1) *Dependent Variable*: Kinerja Keuangan (Y) Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.7 di atas, menunjukan bahwa untuk variabel X1 yaitu komite audit memiliki nilai signifikan 0.385 memiliki signifikan lebih dari 0.05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, variabel X2 yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0.081 memiliki signifikan lebih dari 0.05 sehingga tidak terjadi

heteroskedastisitas, variabel X3 yaitu dewan komisaris memiliki nilai signifikan 0.000 memiliki signifikan kurang dari 0.05 sehingga terjadi heteroskedastisitas dan variabel X4 yaitu *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai signifikan 0.001 memiliki signifikan kurang dari 0.05 sehingga terjadi heteroskedastisitas. Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melakukan transform Absolute Residual.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Pengobatan

Model	Sig
Komite Audit (X1)	.381
Kepemilikan Institusional (X2)	.051
Dewan Komisaris (X3)	.058
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X4)	.701

- 2) Dependent *Variable*: ABS_RES Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.8 di atas, setelah dilakukan transform Absolute Residual menunjukkan bahwa untuk variabel X1 yaitu komite audit memiliki nilai signifikan 0.381, variabel X2 yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0.051, variabel X3 yaitu dewan komisaris memiliki nilai signifikan 0.058 dan variabel X4 yaitu *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai signifikan 0.701.

Masing-masing memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan *Capital Adequacy Ratio* tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.3 Hasil Uji Kesesuaian Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi (R²) data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.202	.183

- 1) Predictors: (*Constant*), Komite Audit (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Dewan Komisaris (X3), *Capital Adequacy Ratio* (X4)
- 2) Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y) Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan uji Koefisien Determinasi (R2) pada Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai R Square adalah 0.202, hal ini menunjukkan bahwa hanya sebesar 20,2% variabel kinerja keuangan pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024 dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan *Capital Adequacy Ratio*. Dan sisanya sebesar 79,8% (hasil dari 100% – 20,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam objek penelitian ini.

b. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Hasil uji Kelayakan Model (Uji Statistik F) data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

F	Sig
10.799	.000b

- 1) Predictors: (*Constant*), Komite Audit (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Dewan Komisaris (X3), *Capital Adequacy Ratio* (X4)
- 2) Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y) Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikan F sebesar 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa model regresi dianggap layak digunakan (fit)

karena variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Statistik (Uji t)

Hasil uji *statistic* (uji t) data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.911	.379		-15.603	.000
	Komite Audit (X1)	.306	.351	.080	.872	.385
	Kepemilikan Institusional (X2)	.587	.335	.123	1.754	.081
	Dewan Komisaris (X3)	.910	.226	.364	4.024	.000
	Capital Adequacy Ratio (X4)	.488	.146	.249	3.339	.001

1) Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y) Sumber: data diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas hasil Uji Statistik (Uji t) dapat diketahui antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.385. Nilai tersebut menunjukkan $0.385 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.306. Maka dapat diambil kesimpulan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan atau dengan kata lain H1 ditolak.
- b) Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0.081. Nilai tersebut menunjukkan $0.081 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.587. Maka dapat diambil kesimpulan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh

- terhadap Kinerja Keuangan atau dengan kata lain H2 ditolak.
- c) Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai tersebut menunjukkan $0.000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.910. Maka dapat diambil kesimpulan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan atau dengan kata lain H3 diterima.
- d) *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.001. Nilai tersebut menunjukkan $0.001 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.488. Maka dapat diambil kesimpulan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan atau dengan kata lain H4 diterima.

4.1.5 Uji Statistik (Uji t)

Hasil uji analisis regresi berganda data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-5.911	0.379
	Komite Audit (X1)	0.306	0.351
	Kepemilikan Institusional (X2)	0.587	0.335
	Dewan Komisaris (X3)	0.910	0.226
	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X4)	0.488	0.146

Dependent Variable Kinerja Keuangan (Y)

Sumber: data diolah SPSS

$$Y = -5.911 + 0.306 + 0.587 + 0.910 + 0.488 + e$$

- Nilai *Constant* sebesar -5.911 menyatakan bahwa jika variabel independen bernilai 0, maka kinerja keuangan adalah sebesar -5.911.
- Nilai koefisien regresi komite audit sebesar 0.306 dengan nilai positif artinya adalah variabel komite audit memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan.

- c. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0.306 dengan nilai positif artinya adalah variabel kepemilikan institusional memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan.
- d. Nilai koefisien regresi dewan komisaris sebesar 0.910 dengan nilai positif artinya adalah variabel dewan komisaris memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini untuk menguji pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap kinerja keuangan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual, diperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kecil ataupun besarnya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memberikan pengaruh bagi turun naiknya profitabilitas karena besarnya jumlah komite audit belum tentu dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Temuan ini dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas komite audit tidak hanya ditentukan oleh kuantitas anggota, tetapi lebih pada kualitas, kompetensi, independensi, serta intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Apabila komite audit hanya berfungsi secara administratif untuk memenuhi regulasi, maka kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan menjadi kurang optimal. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola memang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang substantif, bukan sekadar formalitas struktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Cahyaningrum et al., 2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum tentu mampu memaksimalkan fungsi pengawasan secara efektif, terutama apabila koordinasi dengan direksi

dan manajemen tidak berjalan optimal. Selain itu, kompetensi dan independensi anggota komite audit menjadi faktor penting yang menentukan kualitas pengawasan, sehingga jumlah anggota saja tidak cukup menjadi indikator efektivitasnya.

Dalam konteks regulasi, keberadaan komite audit di Indonesia diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan publik memiliki komite audit minimal tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen. Selain itu, ketentuan ini juga menekankan pentingnya independensi dan kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Artinya, secara normatif struktur komite audit telah diatur dengan jelas untuk mendukung prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tersebut belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan regulatif (*compliance-based governance*) belum tentu sama dengan efektivitas substantif (*performance-based governance*).

Selain itu, dalam Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan Pencatatan Efek, perusahaan tercatat juga diwajibkan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pembentukan komite audit. Meskipun demikian, peran komite audit lebih banyak berfokus pada pengawasan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengendalian internal, yang dampaknya cenderung bersifat jangka panjang dan tidak selalu tercermin secara langsung pada indikator profitabilitas dalam periode penelitian.

Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan (Sifananda et al., 2024) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dapat meningkatkan intensitas kontrol dan pengawasan, yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan strategis. Perbedaan latar belakang, sudut pandang, serta

banyaknya pertimbangan dalam forum komite audit dapat menimbulkan proses birokratis yang lebih panjang sehingga berdampak pada efisiensi operasional dan pada akhirnya menekan kinerja keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran komite audit dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota sebagaimana diatur dalam regulasi, tetapi lebih pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, kualitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan dewan komisaris dan manajemen. Oleh karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan formal dari OJK dan BEI, tetapi perlu memastikan bahwa komite audit bekerja secara profesional, independen, dan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual, diperoleh temuan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional belum tentu menentukan tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan belum secara langsung mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan.

Temuan ini dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu menjalankan fungsi monitoring secara efektif sebagaimana diasumsikan dalam teori agensi. Secara konseptual, investor institusional dianggap memiliki sumber daya, kompetensi, serta kekuatan suara yang lebih besar dalam mengawasi manajemen sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya, tidak semua institusi berperan aktif dalam pengawasan strategis perusahaan. Sebagian investor institusional cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek (*short-term oriented*) dan lebih fokus pada pergerakan harga saham dibandingkan pada perbaikan

fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Kondisi inilah yang dapat terinterpretasikan sebagai salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pramesti & Priyadi, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa kepemilikan institusional belum tentu menjadi mekanisme tata kelola yang efektif apabila tidak disertai keterlibatan aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengawasan terhadap struktur kepemilikan perusahaan publik berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham dan perubahan kepemilikan tertentu. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga mensyaratkan pengungkapan struktur kepemilikan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek keterbukaan dan pelaporan, bukan pada intensitas keterlibatan investor institusional dalam mengawasi manajemen. Oleh karena itu, meskipun secara formal struktur kepemilikan telah diatur dan diawasi, efektivitasnya tetap bergantung pada karakteristik serta orientasi masing-masing institusi.

Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan (Nur'aini & Rohman, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut dapat terinterpretasikan bahwa dominasi kepemilikan institusional berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam struktur tata kelola perusahaan. Kepemilikan yang besar dapat meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk memenuhi target tertentu, bahkan dalam jangka pendek. Selain itu, struktur kepemilikan yang kompleks dapat memperlambat proses pengambilan keputusan akibat adanya perbedaan

kepentingan antar pemegang saham institusional, sehingga berdampak pada efisiensi dan fleksibilitas perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak secara otomatis meningkatkan maupun menurunkan kinerja keuangan. Pengaruhnya sangat bergantung pada tingkat keterlibatan, orientasi investasi, serta kualitas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, selain memenuhi ketentuan regulasi OJK dan BEI terkait transparansi kepemilikan, perusahaan perlu membangun hubungan yang strategis dan kolaboratif dengan investor institusional agar fungsi monitoring dapat berjalan secara substantif dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan jangka panjang.

4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual, diperoleh temuan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, maka kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami peningkatan. Dengan kata lain, keberadaan dewan komisaris sebagai organ pengawas mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong efektivitas pengelolaan perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas.

Temuan ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap direksi menjadi lebih optimal. Dalam perspektif teori agensi, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengawasan internal yang bertugas memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Peningkatan jumlah anggota memungkinkan adanya pembagian tugas pengawasan yang lebih efektif, beragam kompetensi, serta sudut pandang yang lebih luas dalam mengevaluasi kebijakan strategis perusahaan. Kondisi ini dapat meminimalkan praktik oportunistik manajemen dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Kusumawardhany & Shanti, 2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin banyak anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap direksi menjadi lebih intensif dan komprehensif, sehingga manajemen terdorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Dampaknya tercermin pada peningkatan indikator profitabilitas perusahaan.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, peran dan kedudukan dewan komisaris diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mengatur komposisi, independensi, serta tanggung jawab dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini memperkuat posisi dewan komisaris sebagai organ penting dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya dalam aspek akuntabilitas dan responsibilitas.

Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia juga mewajibkan perusahaan tercatat untuk memenuhi ketentuan terkait komisaris independen guna menjamin objektivitas dalam fungsi pengawasan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas kontrol terhadap manajemen, sehingga keputusan strategis lebih terarah dan berorientasi pada keberlanjutan kinerja perusahaan.

Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan (Roihanah & Akbar, 2024) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan temuan ini dapat terinterpretasikan bahwa efektivitas dewan komisaris tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh kualitas, independensi, serta intensitas pelaksanaan tugas pengawasan. Apabila

dewan komisaris hanya berperan secara formal untuk memenuhi regulasi tanpa menjalankan fungsi pengawasan secara substantif, maka kontribusinya terhadap peningkatan *Return On Asset* (ROA) atau indikator kinerja lainnya menjadi tidak signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan apabila menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional. Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BEI menjadi landasan normatif, namun keberhasilan peningkatan kinerja keuangan sangat bergantung pada implementasi nyata prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam praktik operasional sehari-hari.

4.2.4 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual, diperoleh temuan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR, maka kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam menghasilkan laba, juga cenderung meningkat. Sebaliknya, CAR yang rendah berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat karena modal merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perusahaan, terutama pada sektor perbankan.

Temuan ini dapat **terinterpretasikan** bahwa kecukupan modal mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap risiko kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas operasionalnya. Dalam perspektif manajemen risiko, CAR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki bantalan modal (*capital buffer*) yang memadai untuk menghadapi potensi risiko kredit, pasar, maupun operasional. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah, sehingga memperkuat posisi keuangan perusahaan dan membuka peluang yang lebih besar dalam ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sukma & Burhany, 2021) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan. Semakin tinggi rasio kecukupan modal, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam mengembangkan aset produktif secara aman. Dengan modal yang kuat, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit, sehingga peluang memperoleh laba menjadi lebih besar.

Dalam konteks regulasi, CAR merupakan indikator penting yang diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pengawasan kesehatan lembaga keuangan. Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank mengacu pada standar internasional Basel yang diadopsi dalam regulasi perbankan Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia sebelumnya juga menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) guna memastikan stabilitas sistem perbankan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bank wajib menjaga rasio kecukupan modal pada batas minimum tertentu untuk menjamin keberlangsungan usaha dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kewajiban pemenuhan CAR ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Dengan demikian, pengaruh positif CAR terhadap kinerja keuangan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari meningkatnya kepercayaan publik dan kemampuan ekspansi usaha yang lebih terukur.

Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan (Astuti, 2022) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut dapat **terinterpretasikan** bahwa perusahaan yang terlalu berhati-hati dalam menjaga CAR pada tingkat tertentu mungkin membatasi penyaluran dana atau ekspansi kredit guna mempertahankan rasio sesuai ketentuan regulator. Akibatnya, meskipun stabilitas terjaga, potensi peningkatan laba menjadi kurang optimal karena perusahaan cenderung menahan risiko dan mengurangi agresivitas ekspansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan sepanjang

dikelola secara seimbang antara prinsip kehati-hatian dan optimalisasi aset produktif. Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar permodalan menjadi fondasi penting, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja sangat bergantung pada strategi manajemen dalam mengelola modal efisien.

